

**PERSATUAN PERJUANGAN DALAM KONSTELASI POLITIK
INDONESIA PADA MASA REVOLUSI TAHUN 1946**

(Skripsi)

Oleh

WAHYU AGIL PERMANA

2113033066



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERSATUAN PERJUANGAN DALAM KONSTELASI POLITIK INDONESIA PADA MASA REVOLUSI TAHUN 1946

Oleh

WAHYU AGIL PERMANA

Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak utama lahirnya sebuah bangsa yang bebas dan berdaulat. Namun, proklamasi kemerdekaan itu praktis mendapatkan ancaman dari bayang-bayang kolonialisme yang berusaha merangkak kembali untuk mencengkeram Indonesia. Situasi ini kemudian menjelma menjadi tantangan besar, di mana bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya. Periode penuh perjuangan ini diistilahkan sebagai masa revolusi Indonesia. Di tengah situasi politik yang belum stabil tersebut, ketegangan antara kelompok diplomatis dengan kelompok revolusioner mencerminkan tarik-ulur antara pragmatisme politik dan idealisme revolusi. Salah satu manifestasi dari pertentangan tersebut adalah lahirnya organisasi Persatuan Perjuangan pada 15-16 Januari 1946 di Solo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis, dengan tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, sementara teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Persatuan Perjuangan tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu menggalang kekuatan politik, menolak berunding dengan Belanda, dan memprakarsai terbentuknya Konsentrasi Nasional. Melalui ketiga aspek tersebut, Persatuan Perjuangan berhasil memainkan peranan penting dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946.

Kata kunci: Persatuan Perjuangan, Konstelasi Politik, Revolusi Indonesia

ABSTRACT

PERSATUAN PERJUANGAN IN THE POLITICAL CONSTELLATION OF INDONESIA DURING THE REVOLUTION OF 1946

By

WAHYU AGIL PERMANA

The proclamation of Indonesian independence marked a major milestone in the birth of a free and sovereign nation. However, the proclamation of independence was practically threatened by the shadow of colonialism, which was trying to creep back into Indonesia. This situation then became a major challenge, as the Indonesian people had to defend their independence. This period of intense struggle came to be known as the Indonesian Revolution. Amidst the unstable political situation, tensions between diplomatic and revolutionary groups reflected the tug-of-war between political pragmatism and revolutionary idealism. One manifestation of this conflict was the establishment of the Persatuan Perjuangan (Unity of Struggle) organization on January 15-16, 1946, in Solo. This study aims to examine the efforts made by Persatuan Perjuangan in the political constellation of Indonesia during the 1946 revolution. The research method used is the historical method, with research stages including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection techniques were conducted using documentation and literature review techniques, while data analysis techniques were conducted using historical analysis techniques. The results of the study show that the efforts made by the Persatuan Perjuangan are reflected in three main aspects, namely mobilizing political power, refusing to negotiate with the Dutch, and initiating the formation of the National Concentration. Through these three aspects, the Persatuan Perjuangan succeeded in playing an important role in the political constellation of Indonesia during the 1946 revolution.

Keywords: *Persatuan Perjuangan, Political Constellation, Indonesian Revolution*

**PERSATUAN PERJUANGAN DALAM KONSTELASI POLITIK
INDONESIA PADA MASA REVOLUSI TAHUN 1946**

**Oleh
WAHYU AGIL PERMANA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERSATUAN PERJUANGAN DALAM
KONSTELASI POLITIK INDONESIA PADA
MASA REVOLUSI TAHUN 1946**

Nama Mahasiswa

: **Wahyu Agil Permana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2113033066**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Program Studi

: **Pendidikan Sejarah**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syaiful M, M.Si

NIP.196106031985031004


Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd

NIK.231804920930201

MENGETAHUI

**Ketua Jurusan
Ilmu Pengetahuan Sosial,**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**


Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd

NIP.197411082005011003


Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum

NIP.197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Syaiful M, M.Si

Sekretaris : Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd

Penguji

Bukan Pembimbing : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd

NIP.198705042014041001

Tanggal lulus ujian skripsi: 10 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Wahyu Agil Permana
NPM : 2113033066
program studi : Pendidikan Sejarah
jurusan/fakultas : Pendidikan IPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
alamat : Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan hasil plagiasi dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 13 Agustus 2025



Wahyu Agil Permana
NPM. 2113033066

BIODATA



Wahyu Agil Permana dilahirkan di Pringsewu, Lampung pada 3 Juni. Tanggal kelahirannya yang hanya selisih satu hari dengan Tan Malaka (2 Juni) menjadi alasan tersendiri baginya untuk mengidolakan sosok pemikir *cum* revolusioner tersebut. Agil, demikian sapaan akrabnya, mulai mengenyam pendidikan dasar sejak usianya yang sangat belia, yaitu empat tahun. Antusiasnya pada ilmu pengetahuan terus berkembang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menempuh studi humaniora di Universitas Lampung. Selama menyandang status mahasiswa, ia kerap menyuarakan kegelisahan intelektualnya melalui tulisan. Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai media massa, antara lain *Buletin Lembaran Perpustakaan RI*, *Majalah Riwayat*, *Harian Jawa Pos*, *Harian Lampung Post*, *Harian Radar Lampung*, *Kompas.id*, *Historia.id*, *Semutapi.id*, *BandungBergerak.id*, *Omong-omong.com*, *Semilir.co*, dan lain-lain. Ia juga telah menerbitkan beberapa artikel jurnal ilmiah serta sebuah buku berjudul “*Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi*” yang merupakan hasil riset kolaboratif bersama rekan-rekan sejawatnya.

Selain aktif menulis, Agil pernah mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) batch 4 di Universitas Padjadjaran. Di bidang organisasi, ia sempat menjabat sebagai Ketua IKA Al Hikmah Konsulat Unila (2022-2024), Wakil Ketua Umum II Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah Unila (2023), Staf Ahli Bidang Ilmu Kepemudaan BEM FKIP Unila (2022), serta Koordinator Bidang Organisasi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Pesawaran (2023-2025).

MOTO

“Merdeka berpikir-berpikir merdeka: radikal, rasional, konseptual.”

Azvagen

“Menjadi pemuda dan tidak revolusioner adalah kontradiksi biologis.”

Salvador Allende

“Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut dengan muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakkan (absolute entity), tanpa menghubungkan-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk, serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.”

Ahmad Wahib

PERSEMBAHAN

Kepada Warsito, S.Pd., M.M dan Asyunani, S.Pd

Kedua orang tuaku:

jiwa yang selalu hadir dan pelipur nestapa perjalanan.

Serta kepada mereka yang bertaruh segalanya,

dan yang gugur diam-diam agar republik ini tak runtuh dalam senyap.

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah swt, sebuah frasa yang semestinya rutin saya lisankan sebagai wujud penghambaan kepada-Nya, atas serbaneka nikmat yang dilimpahkan kepada seluruh makhluk. Serta selawat kepada Nabi Muhammad saw, semoga senantiasa turut mengalir di palung sunyi jiwa saya, sebagai ikhtiar tulus menunaikan cinta kepada kekasih ilahi.

Maklum diketahui, skripsi ini ditulis sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya menyadari, dalam setiap perjalanan, rasa syukur dan terima kasih masih menjadi seluk-beluk segala pencapaian. Skripsi ini menjadi salah satu pencapaian itu, yang mustahil lahir tanpa bantuan banyak pihak. Persis seperti aforisme yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial yang dependen). Oleh karenanya, sebagai bentuk kesadaran atas hal itu, saya mengucapkan terima kasih khusus kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas, yang telah memberikan ulasan, kritik, dan kepeduliannya bagi penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kepeduliannya bagi penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kepeduliannya bagi penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum selaku dosen saya ketika menjalani pertukaran mahasiswa di Universitas Padjadjaran, atas pencerahan akademiknya, sehingga saya terinspirasi untuk melakukan penelitian mengenai Persatuan Perjuangan.
11. Bapak Fadly Rahman, S.S., M.A selaku dosen saya ketika menjalani pertukaran mahasiswa di Universitas Padjadjaran, atas segala hal-hal intelektual yang diajarkan sekaligus turut memingit spirit literasi dalam benak saya.
12. Bapak Arman AZ, sejarawan *cum* sastrawan Lampung, yang jejak pikirnya tidak hanya menghidupkan memori kolektif, tetapi juga menjaga nyala kesadaran sejarah di tengah masyarakat yang kerap tergesa.
13. Bapak Warsito, S.Pd., M.M dan Ibu Asyunani, S.Pd., kedua orang tua saya, yang dalam kandungan kalbunya mengalir air murni rida ilahi, serta doanya menjelma pelita di tengah gempita gulita. Kepada merekalah saya belajar, bahwa esensi hidup bukanlah perkara hasil, melainkan kesetiaan pada laku harian yang tenang dan bahkan nyaris tak terdengar.
14. Winda Devita, Amd.Kep., kakak saya, atas kelapangan hati dan keluasan batinnya. Kita harus membaca lagi, agar bisa menuliskan isi kepala.
15. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung, yang telah mengajari saya tentang arti ilmu pengetahuan, moral, dan etika. Bahwa

insan akademis tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga meresapi nilai-nilai etis dalam proses pencarian kebenaran.

16. Staf beserta karyawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia, atas keramahan dan kerendahan hatinya, membuka jalan bagi saya dalam menapaki jejak-jejak arsip dan literatur menjadi suatu prosesi ziarah yang bermakna.
17. Rekan-rekan Civitas Academica Pendidikan Sejarah 2021, umumnya, serta handai taulan; Subhan Al Qodri, Wahyu Sarifudin, Muhammad Sahrul Dwi Wantoro, Sendi Sanjaya, Ilham Pratama, M. Aldi Rahman Indra Jaya, khususnya, yang turut menorehkan garis-garis fraktal dalam hidup saya, sehingga membentuk sebuah ketidakterpolaan yang terpola.
18. Segenap karib di luar lingkup akademik, yang namanya muskil diringkus oleh paragraf normal. Tanpa kehadiran kalian, barangkali hidup saya hanya dihantui oleh kutukan akademik, sambil terus terpuruk murung hingga melupakan betapa hidup itu multidimensional dan kebak makna.
19. Seluruh elemen yang terlibat dan berpartisipasi sejak awal hingga tahap ini, beserta multiperan semua anasir.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam aneka wujud, tidak hanya sebagai prasyarat akademik, tetapi juga sebagai sumbangsih dalam memperkaya literatur intelektual. Sebagai karya tulis sekaligus wahana yang membuka ruang percakapan akademik, tentu saya mengapresiasi niat baik pembaca bila berkenan memberikan kritik, saran, atau diskusi lanjutan mengenai hasil penulisan skripsi ini.

Bandarlampung, 13 Agustus 2025



Wahyu Agil Permana
NPM. 2113033066

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SANWACANA..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Kerangka Pikir | 9 |
| 1.6 Paradigma..... | 10 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Kajian Teori..... | 11 |
| 2.1.1 Masa Revolusi Indonesia | 11 |
| 2.1.2 Situasi Politik Indonesia Tahun 1946 | 13 |
| 2.1.3 Organisasi Persatuan Perjuangan | 15 |
| 2.2 Penelitian Relevan..... | 18 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 21 |
| 3.1 Ruang Lingkup..... | 21 |
| 3.2 Metode Penelitian..... | 21 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 3.3.1 Teknik Kepustakaan..... | 26 |
| 3.3.2 Teknik Dokumentasi | 27 |
| 3.4 Teknik Analisis Data | 28 |

| | |
|--|------------|
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 29 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 29 |
| 4.1.1 Situasi Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan..... | 29 |
| 4.1.2 Pertentangan Golongan Diplomatis dengan Revolusioner | 41 |
| 4.1.3 Ihwal Awal Persatuan Perjuangan | 47 |
| 4.1.4 Menggalang Kekuatan Politik..... | 56 |
| 4.1.5 Menolak Berunding dengan Belanda | 81 |
| 4.1.6 Memprakarsai Terbentuknya Konsentrasi Nasional | 115 |
| 4.2 Pembahasan..... | 124 |
| 4.2.1 Upaya-upaya Persatuan Perjuangan dalam Konstelasi Politik Indonesia Tahun 1946..... | 124 |
| 4.2.2 Menggalang Kekuatan Politik..... | 126 |
| 4.2.3 Menolak Berunding dengan Belanda | 130 |
| 4.2.4 Memprakarsai Terbentuknya Konsentrasi Nasional | 134 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 138 |
| 5.1 Kesimpulan | 138 |
| 5.2 Saran..... | 140 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 142 |
| LAMPIRAN..... | 150 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Maklumat pemerintah 3 November 1945 | 32 |
| Gambar 2. Penetapan delegasi dan sekretariat Persatuan Perjuangan | 66 |
| Gambar 3. Pemberitaan tentang pertemuan delegasi Persatuan Perjuangan dengan pemerintah..... | 84 |
| Gambar 4. Pembahasan mengenai pertemuan Persatuan Perjuangan dengan pemerintah..... | 86 |
| Gambar 5. Mosi hasil rapat Persatuan Perjuangan pada 20 Februari 1946 di Yogyakarta | 87 |
| Gambar 6. Susunan Kabinet Syahrir II. | 92 |
| Gambar 7. Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi umum..... | 96 |
| Gambar 8. Tuntutan demonstrasi umum 17 Februari 1946..... | 98 |
| Gambar 9. Maklumat BP KNIP No. 21..... | 103 |
| Gambar 10. Berita penangkapan pimpinan Persatuan Perjuangan | 107 |
| Gambar 11. Maklumat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri 18 Maret 1946 | 109 |
| Gambar 12. Keterangan pemerintah tentang penangkapan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan..... | 110 |
| Gambar 13. Mosi Persatuan Perjuangan tentang penangkapan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan | 114 |
| Gambar 14. Surat terbuka Persatuan Perjuangan..... | 118 |
| Gambar 15. Pembentukan Konsentrasi Nasional..... | 121 |
| Gambar 16. Berita pembubaran Persatuan Perjuangan..... | 123 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah yang memegang peranan sentral dalam sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Kemerdekaan diartikan bukan hanya berupa pembebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga pembebasan dari berbagai bentuk penindasan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perjuangan kemerdekaan yang patriotik telah membangkitkan imajinasi akan harkat kemanusiaan dan simpati pada bangsa yang mempertahankan haknya untuk mendapatkan kemerdekaan. Dengan semangat gotong royong, rasa cinta tanah air, dan cita-cita untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat, kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal bagi perjalanan panjang bangsa dalam membangun negeri yang berdaulat, adil dan makmur. Berbagai perjuangan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil kemerdekaan Indonesia dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Moedjanto, 1988).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuka suatu periode baru bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, gema proklamasi ini bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan sebuah fajar yang baru menyingsing di tengah cakrawala yang masih dipenuhi awan badai. Kemerdekaan yang diraih melalui momentum kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) akibat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik merupakan sebuah aset yang rapuh. Euforia yang melanda segenap bangsa, dari Sabang sampai Merauke, segera berhadapan dengan realitas pahit. Sebab, Belanda—sebagai pihak yang pernah menjajah Indonesia—tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka justru bersiap untuk kembali dan menegaskan kembali kekuasaannya di Indonesia (Rohman, 2017).

Ancaman ini menjadi konkret ketika pasukan Sekutu di bawah bendera *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) datang ke Indonesia pada pertengahan September 1945. Misi utama mereka adalah untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Sekutu. Namun, rakyat Indonesia melihat kedatangan Sekutu tersebut dengan penuh kecurigaan. Sikap skeptis masyarakat Indonesia ini menjadi logis ketika di belakang pasukan Sekutu terdapat aparat sipil Belanda di bawah bendera *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). NICA secara sistematis mulai berusaha mengambil alih kembali kendali pemerintahan di berbagai kota. Insiden-insiden pengibaran bendera Belanda dan arogansi serdadu NICA memicu pertempuran yang heroik di berbagai wilayah, seperti Medan, Semarang, Ambarawa, Surabaya, dan Bandung (Rahman, 2013).

Selaras dengan itu, keberadaan pemerintahan Indonesia oleh Sekutu dianggap belum sah. Musababnya, ruang-ruang pemerintahan banyak diisi oleh tokoh yang memiliki riwayat pernah bekerja sama dengan Jepang. Kondisi ini membuat Sekutu sulit mengakui keberadaan Republik Indonesia. Sekutu menganggap Indonesia sebagai negara bentukan Jepang. Ditambah, lemahnya kepemimpinan di pemerintahan juga telah melahirkan gerakan-gerakan bersenjata yang memanfaatkan situasi demi kepentingan masing-masing. Maka, pemerintah Indonesia melakukan berbagai perubahan struktural dalam tubuh pemerintahan sebagai upaya penyelesaian konflik dan penataan kekuasaan (Jauhari, 2004).

Berbagai kebijakan pun mulai diterapkan, mulai dari penetapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif, pembentukan partai-partai politik, hingga perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, dengan Sutan Syahrir diangkat sebagai perdana menteri (Setiawan, 2020). Syahrir yang merupakan seorang intelektual sosialis dianggap sebagai figur yang dapat diterima oleh Sekutu, karena ia dikenal non-kooperatif selama masa pendudukan Jepang. Dengan demikian, Syahrir segera membentuk susunan anggota Kabinetnya. Namun, Kabinet ini justru dianggap sebagai antek-antek Belanda, karena sebagian tokoh yang menjabat pernah menjadi pejabat ketika masa kolonialisme Belanda (Anderson, 2018). Setelah

susunan Kabinet terbentuk, Syahrir segera melakukan upaya penyelesaian konflik melalui kebijakan kerja sama dan diplomasi. Berbagai perundingan pun dilakukan oleh Syahrir, hingga puncaknya pada 19 November 1945 ketika Jakarta secara praktis dikuasai oleh tentara Sekutu. Berbagai pertempuran pun menjadi tak terhindarkan. Ibukota negara akhirnya terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta untuk menghindari tekanan langsung dari Sekutu dan NICA (Setiawan, 2019).

Memasuki akhir dekade 1945, situasi semakin kritis. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada sebuah dilema yang strategis yang fundamental. Di satu sisi, konfrontasi militer terus berkecamuk di berbagai daerah. Di sisi yang lain, pihak NICA terus meningkatkan tekanan militer dan politiknya. Kelambanan pemerintahan Syahrir dalam menghasilkan diplomasi memicu ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Padahal, ketika Kabinet Syahrir memegang kendali pemerintah, para pemuda menaruh harapan bahwa segala persoalan akan mampu dipecahkan dengan semangat revolusioner (Aini, 2023). Namun nyatanya, terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realitas. Dalam atmosfer genting inilah, bangsa Indonesia terbelah dalam dua kubu mengenai cara terbaik untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja direngkuh. Hal ini dipicu oleh rakyat yang merasa putus asa terhadap kebijakan Kabinet Syahrir yang dinilai tidak revolusioner (Hilmi, 2009).

Perpecahan ini menciptakan perbedaan strategi perjuangan yang mengkristal menjadi dua kutub yang saling berlawanan. Kutub pertama adalah golongan diplomatis, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kabinet Syahrir. Kabinet Syahrir meyakini bahwa menghadapi kekuatan gabungan dari Sekutu dan Belanda dalam sebuah perang terbuka adalah tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, Syahrir berpandangan bahwa satu-satunya jalan yang rasional adalah memperjuangkan pengakuan kedaulatan (*de jure*) melalui meja perundingan (Syahputra, 2011). Syahrir dan para pengikutnya berargumen bahwa pengakuan internasional dianggap senjata paling ampuh untuk memaksa Belanda menerima kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang

beradab, mampu bernegosiasi, dan dapat mengelola negara dengan baik (Gustaf, 1996).

Sementara di kutub yang berseberangan, terbentuk golongan revolusioner yang berpandangan bahwa perjuangan mesti dilaksanakan dengan konfrontasi total. Golongan ini dipelopori oleh Tan Malaka yang tidak puas terhadap kebijakan diplomasi Syahrir. Tan juga memandang bahwa pembentukan berbagai partai politik hanya akan menggiring rakyat pada perpecahan yang merugikan. Perpecahan di kalangan elite revolusi menjadi semakin tegang ketika partai-partai politik terbentuk (Ricklefs, 2016). Di samping itu, Tan Malaka yang telah melakukan pengembaraannya mengelilingi pulau Jawa beranggapan bahwa kemauan pemerintah tidak cocok dengan kemauan perjuangan rakyat di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Magelang, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa upaya diperlukan untuk menghadapi ancaman Sekutu dan NICA adalah dengan membentuk suatu gerakan perlawanan revolusioner yang terkoordinasi (Anderson, 2018). Tan menekankan jika suatu revolusi hanya mungkin terjadi dengan mengintegrasikan seluruh kekuatan revolusioner dalam suatu wadah front persatuan yang dipersatukan oleh persamaan, yaitu kemerdekaan 100% (Malaka, 2022).

Sentimen ini kemudian mengakar kuat di kalangan rakyat yang sedang berjuang, yang merasa bahwa para elite politik tidak memahami denyut nadi perjuangan rakyat sesungguhnya. Sebab, mereka menyaksikan sendiri kebrutalan tentara NICA, merasakan langsung panasnya desingan peluru, dan melihat kawan-kawan seperjuangan yang gugur di panggung perang. Dengan begitu, kalangan rakyat revolusioner beranggapan bahwa kemerdekaan yang direbut melalui perjuangan fisik mesti dipertahankan dengan cara yang demikian juga. Dualisme strategi perjuangan ini menciptakan sebuah ketegangan internal yang eksplosif, yang pada akhirnya menyediakan panggung bagi lahirnya sebuah kekuatan politik alternatif yang radikal dan tanpa kompromi.

Kritik dan tekanan terhadap Kabinet Syahrir ini kemudian melahirkan Persatuan Perjuangan yang mulai digagas pada awal Januari 1946 melalui

kongres *Volksfront* di Purwokerto, lalu diresmikan pada 15-16 Januari di Solo. Persatuan Perjuangan merupakan koalisi dari berbagai organisasi yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang tidak puas dengan kebijakan diplomasi pemerintah. Koalisi ini menuntut kemerdekaan 100% sebagai dasar Republik Indonesia di dalam melakukan perundingan dan tuntutan lain yang disebut sebagai minimum program (Basundoro, 2012). Program ini lebih dari sekadar pekik perjuangan, lebih jauh merupakan program aksi yang jelas sebagai antitesis langsung dari kebijakan Kabinet Syahrir. Minimum program memiliki beberapa tuntutan pokok yang terdiri atas tujuh butir pasal, yaitu; 1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%, 2) Pemerintahan rakyat (sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat), 3) Tentara rakyat (sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat), 4) Melucuti tentara Jepang, 5) Mengurus tawanan Eropa, 6) Menyita dan menyelenggarakan aset pertanian musuh (perkebunan), 7) Menyita dan menyelenggarakan aset pertanian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain) (Abdulgani dkk., 2004).

Berdirinya organisasi Persatuan Perjuangan merupakan sebagai pernyataan tidak puas dari sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap garis kebijakan politik Kabinet Syahrir yang dianggap terlalu lunak karena memilih jalan diplomasi. Bagi Persatuan Perjuangan, perundingan hanya bisa dilaksanakan dengan dasar kemerdekaan 100%. Artinya, Indonesia harus terlebih dahulu diakui kemerdekaannya secara penuh sebelum melaksanakan perundingan (Amroni, 2014). Kehadiran Persatuan Perjuangan dengan cepat mengubah lanskap politik nasional dari sekadar perbedaan pendapat menjadi sebuah konfrontasi terbuka. Persatuan Perjuangan tidak hanya berwacana, tetapi juga aktif bergerak. Melalui serangkaian kongres, rapat-rapat umum, dan propaganda yang gencar dilakukan, mereka berhasil secara sistematis mendelegitimasi kebijakan diplomasi pemerintah (Pambudi, 2023).

Menurut Zara (2009) organisasi Persatuan Perjuangan didirikan untuk mencapai tujuan merdeka 100% yang disusun dalam minimum program Persatuan Perjuangan, lalu diajukan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Namun, pihak pemerintah menolak program tersebut dan dengan berbagai cara dan upaya untuk membubarkan Persatuan Perjuangan. Akibatnya, pada

kongres Persatuan Perjuangan di Madiun, Tan Malaka dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan ditahan lebih dari dua Tahun sambil menunggu diadili. Hingga kemudian pada 4 Juni 1946, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk membubarkan diri. Ironisnya, organisasi ini bubar bukan karena tujuannya sudah tercapai, melainkan karena pemerintah yang merasa terganggu dengan aksi-aksi Persatuan Perjuangan merasa bahwa organisasi ini harus dibungkam (Alfian, 1977).

Selaras dengan itu, historiografi Indonesia kontemporer menempatkan Persatuan Perjuangan pada tempat yang samar-samar, bahkan di tempat kegelapan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak begitu paham dan asing dengan gerakan yang bernama Persatuan Perjuangan. Organisasi ini dihapus dari sejarah Indonesia karena dianggap sebagai persekongkolan gelap untuk menurunkan pemerintahan yang sah (Basundoro, 2012). Kekosongan narasi inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini dilakukan. Persatuan Perjuangan, yang sering kali dipinggirkan atau diberi label secara apriori, perlu ditelusuri lebih mendalam untuk memahami seluruh spektrum dan kompleksitas revolusi nasional Indonesia. Oleh karena itu, dari uraian tersebut, menjadi sangat penting untuk dilakukan kajian secara komprehensif mengenai Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan sejarah dan juga memperkaya landasan teoretis dalam studi sejarah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Beberapa kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademis mengenai sejarah revolusi Indonesia. Penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmiah tentang dinamika politik di Indonesia pada Tahun 1946, terutama tentang peran sentral Persatuan Perjuangan dalam revolusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam sejarah politik dan revolusi Indonesia.

a.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Universitas Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai referensi penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik pada topik sejarah kemerdekaan dan dinamika politik Indonesia pada masa revolusi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan kajian akademis, terutama dalam bidang sejarah, politik, dan studi revolusi Indonesia.

2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi dalam kurikulum mata kuliah yang terkait dengan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Serta diharapkan dapat memberikan dorongan bagi fakultas untuk mengembangkan pusat kajian atau laboratorium khusus yang berfokus pada studi sejarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas akademis fakultas.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian sejarah yang mendalam, termasuk pengembangan keterampilan dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan sejarah. Penulis juga mendapatkan perspektif baru terkait dinamika organisasi politik dalam konstelasi politik Indonesia, khususnya pada masa revolusi Indonesia.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai organisasi Persatuan Perjuangan serta sepak terjangnya pada masa revolusi Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi pembaca dalam memahami semangat nasionalisme dan solidaritas nasional yang tercermin dalam organisasi Persatuan Perjuangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian baru dengan topik yang berkaitan secara lebih mendalam dan komprehensif.

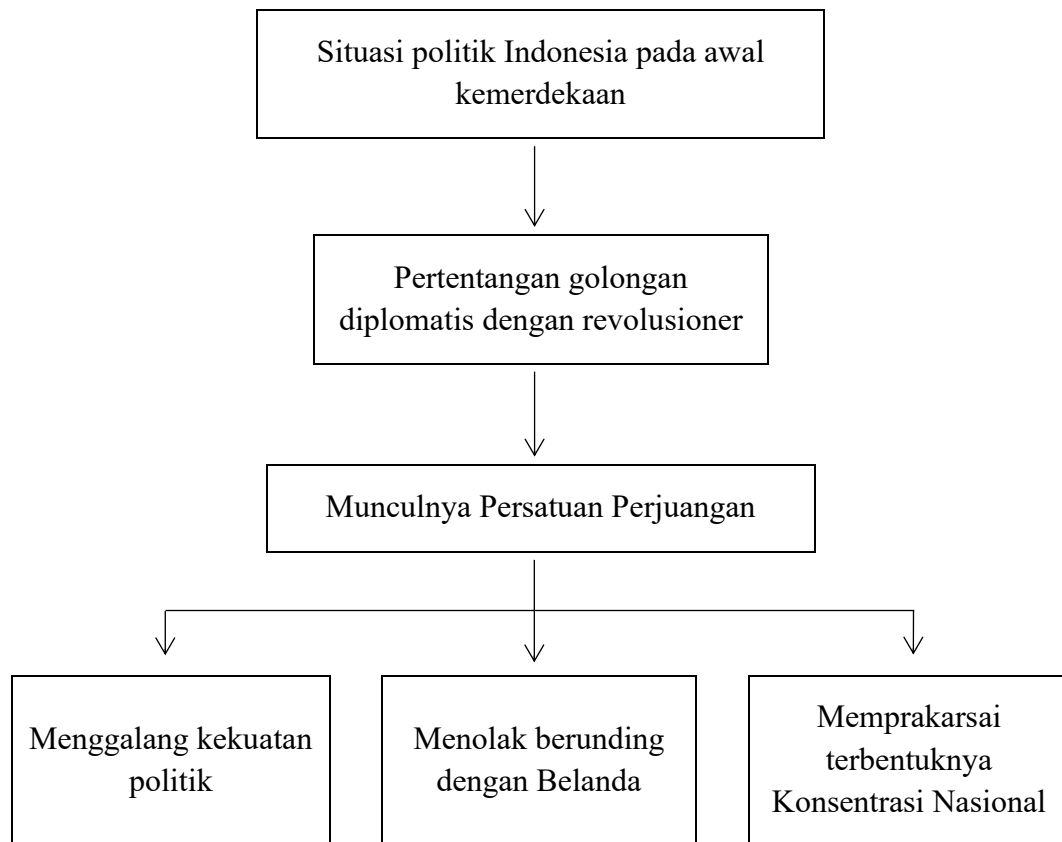
1.5 Kerangka Pikir

Pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia memasuki periode yang tidak kalah genting dibanding saat perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Euforia atas lepasnya belenggu kolonial segera disusul oleh realitas bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya diakui dan bahkan terancam untuk direbut kembali oleh kekuatan asing, terutama Belanda yang datang kembali membonceng Sekutu. Dalam ketegangan tersebut, revolusi menjadi medan pertarungan bukan hanya secara militer, tetapi juga secara ideologis dan politik. Berbagai kekuatan mulai bermunculan, masing-masing membawa visi tersendiri tentang seperti apa Republik seharusnya dijalankan. Di sinilah muncul sebuah kekuatan tandingan, yakni Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Tahun 1946 menjadi momen krusial ketika Republik dihadapkan pada dua arus besar yang saling bertentangan: jalur diplomasi dan jalur revolusi. Pemerintahan Sutan Syahrir, memilih jalan kompromi sebagai sebuah strategi yang dianggap realistis dalam menjaga eksistensi negara di tengah tekanan militer asing dan kelangkaan sumber daya. Namun, bagi sebagian kalangan yang terhimpun dalam Persatuan Perjuangan, langkah Syahrir dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan. Mereka menolak segala bentuk perundingan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap kedaulatan Belanda atau mempertanyakan keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi Persatuan Perjuangan, kemerdekaan harus bersifat mutlak, tanpa syarat, dan tidak untuk ditukar dengan kompromi politik.

Persatuan Perjuangan merupakan federasi dari berbagai unsur kekuatan—baik sipil maupun militer—yang merasa tidak puas terhadap arah politik republik. Persatuan Perjuangan berusaha menawarkan alternatif garis politik revolusi total, konsolidasi kekuatan nasional, dan penolakan mutlak terhadap diplomasi. Manifesto politiknya menyerukan penolakan terhadap segala bentuk perundingan dengan Belanda, dan menuntut pembentukan pemerintahan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat dan cita-cita kemerdekaan.

1.6 Paradigma



Keterangan:

—————> : Garis aktivitas

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Masa Revolusi Indonesia

Masa revolusi Indonesia berlangsung antara Tahun 1945 hingga akhir 1949, yaitu periode setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Masa ini kerap disebut sebagai masa revolusi kemerdekaan karena melibatkan perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan (Rinardi, 2017). Masa revolusi ini ditandai dengan serangkaian pertempuran, diplomasi, dan konsolidasi nasional untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peran penting kalangan revolusioner tidak luput sebagai peranan kolektif dalam revolusi Indonesia. Para golongan pemuda adalah yang memelopori gerakan-gerakan solidaritas, baik di kota-kota kecil maupun di ibukota (Anderson, 2018).

Revolusi Indonesia memiliki corak tersendiri. Di satu sisi, sebagian para nasionalis yang berpendidikan tinggi menggunakan pola perjuangan diplomasi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pihak tentara dan laskar rakyat memilih perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahap ini, revolusi Indonesia mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu ketika Indonesia menghadapi agresi militer oleh Belanda. Di saat itu pula para tokoh kemerdekaan yang bersikap konfrontatif terhadap pemerintah melakukan pemberontakan di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Madiun, dan lain-lain (Khaldun, 2021).

Selama periode ini, berbagai pertempuran terjadi secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai intervensi internasional juga turut terjadi. Sengitnya perlawanan fisik dan diplomatik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membuat Belanda sulit menguasai Indonesia secara keseluruhan (Simatupang, 1981).

Di awal revolusi, tidak satu pun pembagian dasar di antara bangsa Indonesia tersebut telah terpecahkan, kecuali sepanjang ada kesepakatan tentang kemerdekaan sebagai tujuan utama bagi kaum revolusioner. Walaupun saling mencurigai, namun kekuatan-kekuatan bersenjata dan diplomasi secara bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan. Kekuatan-kekuatan yang mendukung revolusi sosial, generasi muda, dan golongan kiri semuanya menghadapi harapan yang sangat terbatas (Ricklefs, 2016).

Kedaulatan dan persatuan bangsa masih harus terus diuji karena masih adanya ancaman dari luar seperti Belanda yang mengandalkan tentara NICA. Begitu pula dari dalam negeri belum sepenuhnya stabil karena adanya ancaman keamanan di mana-mana. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan antara kekuatan bersenjata dan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan gambaran mengenai suatu masa ketika perpecahan menimpa bangsa Indonesia beraneka ragam dan terus-menerus berubah (Ayuningtyas dkk., 2016).

Masa revolusi Indonesia (1945-1949) merupakan salah satu masa yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi menjadi alat tercapainya kemerdekaan, bukan hanya sebagai kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa itu sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk

persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa pasca Perang Dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba (Ricklefs, 2016).

Pada masa revolusi Indonesia, seluruh lapisan rakyat Indonesia menolak keras kembalinya kolonialisme di Indonesia. Revolusi Indonesia bertujuan untuk menghapuskan segala hal-hal yang masih berhubungan dengan pihak-pihak kolonialis-imperialis yang berpotensi mengganggu keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan sedang mengupayakan kedaulatan penuh (Prayogi, 2024). Pada masa ini, terdapat signifikansi penting dalam penentuan kedaulatan bangsa Indonesia yang baru saja berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Selama revolusi, Indonesia memerlukan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Untuk itu, revolusi Indonesia menjadi jalan perjuangan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia (Anggraeini dkk., 2022).

2.1.2 Situasi Politik Indonesia Tahun 1946

Tahun 1946 menandai salah satu fase paling genting dalam sejarah awal Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui jalur militer dan diplomatik. Dalam konteks ini, dinamika politik Indonesia Tahun 1946 ditandai oleh ketegangan antara dua poros utama, kelompok yang mendorong jalur diplomasi dan kelompok yang mengedepankan garis perjuangan revolusioner (Fitri, 2015).

Secara umum, pemerintahan Indonesia pada awal 1946 masih berupaya menata struktur negara. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946 merupakan langkah strategis untuk menghindari tekanan militer Sekutu dan Belanda. Namun, langkah ini juga

mencerminkan kondisi yang tidak stabil secara politik dan keamanan. Di Yogyakarta, pemerintahan Soekarno-Hatta berusaha memusatkan kembali otoritas pemerintahan, sekaligus membangun sistem administrasi dan militer yang memadai (Yamin, 1982).

Sementara itu, dinamika internal muncul dari pertentangan ideologis antara kelompok moderat yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Sutan Syahrir dengan kelompok yang lebih radikal seperti Tan Malaka dan organisasi yang dipimpinnya, yakni Persatuan Perjuangan. Kelompok moderat condong pada diplomasi dengan harapan memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional. Sebaliknya, kelompok revolusioner menilai pendekatan ini sebagai bentuk kompromi yang membahayakan cita-cita kemerdekaan sejati (Baeha dkk., 2022).

Puncak ketegangan ini terjadi pada awal Tahun 1946, ketika Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan menolak keras perundingan-perundingan dengan Belanda, seperti yang tergambar dalam maklumat dan kritik keras terhadap kabinet Syahrir. Mereka menghendaki pembentukan pemerintahan yang sepenuhnya berdasarkan kehendak rakyat dan menolak segala bentuk perundingan yang memberi ruang kembalinya kekuasaan kolonial (Septiana dkk., 2017).

Situasi ini memunculkan krisis politik yang cukup serius. Kabinet Syahrir mengalami tekanan dan bahkan sempat diturunkan oleh Presiden Soekarno pada Februari 1946, meskipun kemudian dibentuk kembali. Dalam kondisi demikian, pemerintah menghadapi dilema antara mengakomodasi kekuatan revolusioner atau menegaskan jalur diplomatik sebagai strategi utama (Khaldun, 2021)

Di tengah perpecahan ini, muncul pula berbagai organisasi politik dan militer dengan basis kekuatan regional, yang kadang tidak sejalan dengan pusat. Fragmentasi politik ini mencerminkan lemahnya konsolidasi nasional pada masa revolusi, serta kerentanan Indonesia terhadap ancaman internal dan eksternal. Tahun 1946 juga menjadi Tahun yang menentukan dalam membentuk karakter politik Indonesia ke depan,

terutama dalam memilih jalan bernegosiasi sembari tetap mempertahankan semangat revolusi (Wahyudi & Hartati, 2021).

2.1.3 Organisasi Persatuan Perjuangan

Organisasi merupakan wadah bagi sekumpulan individu yang memiliki struktural, sistem, dan visi misi. Rogers (2003) mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem antar individu yang stabil dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama lewat struktur hierarki dan pembagian program kerja. Sedangkan menurut Jackson & Mathis (2006) organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas.

Organisasi memiliki sebuah sistem yang terdiri dari komponen di dalamnya yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam sistem tersebut, dibutuhkan koordinasi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang umum, antara lain; memiliki struktur, sistem dan visi misi (Winardi, 2009). Sehingga organisasi dapat disimpulkan sebagai sistem yang saling berhubungan satu sama lain untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam mencapai tujuan umum atau tujuan bersama.

Persatuan Perjuangan merupakan organisasi massa yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi, laskar, partai politik, dan lain sebagainya yang bertujuan sebagai wadah untuk menciptakan persatuan guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Organisasi ini pertama kali digagas oleh Tan Malaka pada sebuah kongres yang dilaksanakan di Purwokerto pada 4 Januari 1946. Kemudian baru diresmikan dan dinamakan “Persatuan Perjuangan” pada kongres selanjutnya yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Solo pada 15 Januari 1946. Organisasi ini berupaya untuk menyatukan berbagai elemen perjuangan Indonesia di bawah satu

tujuan yang jelas yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia 100% tanpa ada unsur campur tangan pihak asing (Poeze, 2008a).

1. Struktur Organisasi Persatuan Perjuangan

Struktur organisasi Persatuan Perjuangan terdiri dari tokoh-tokoh dan perwakilan berbagai partai atau kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Menurut Poeze (2008) struktural organisasi Persatuan Perjuangan terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------|
| a. Promotor | : Tan Malaka |
| b. Sekretaris Umum | : Sukarni |
| c. Ketua Bagian Penyelesaian Perselisihan | : Wali Alfatah |
| d. Ketua Bagian Politik | : Chairul Saleh |
| e. Ketua Bagian Ekonomi | : S.K Trimurti |
| f. Ketua Bagian Pertahanan | : Ir. Sakirman |

Ada pun tugas dari masing-masing komisi yakni; bagian penyelesaian perselisihan bekerja untuk memecahkan konflik yang terjadi dalam organisasi. Bagian politik bekerja untuk urusan-urusan minimum program, mengawasi perilaku anggota yang mengikuti garis Persatuan Perjuangan, urusan propaganda dan organisasi. Bagian ekonomi bekerja untuk perindustrian, perkebunan, pasar dan koperasi. Sedangkan bagian pertahanan bekerja untuk urusan tentara, politik, pemuda, dan latihan-latihan militer serta politik (Poeze, 2008a).

2. Keanggotaan Organisasi Persatuan Perjuangan

Persatuan Perjuangan merupakan sebuah organisasi yang menjadi wadah dari beberapa organisasi lainnya. Pada kongres pertama di Purwokerto tercatat ada sekitar 40 organisasi yang turut hadir dalam kongres tersebut. Sedangkan pada kongres kedua Persatuan Perjuangan di Solo tercatat sekitar 137 organisasi yang menghadiri kongres tersebut (Alfian, 1977). Jumlah-jumlah tersebut didapatkan dari berbagai surat kabar Tahun 1946, memang tidak ada secara spesifik disebutkan organisasi apa saja yang tergabung dalam

Persatuan Perjuangan. Namun, Abdulgani dkk., (2004) menjelaskan keanggotaan organisasi Persatuan Perjuangan terdiri dari:

- a. Anggota Persatuan Perjuangan terdiri atas organisasi politik, sosial, dan ketentaraan.
- b. Anggota kongres terdiri dari anggota-anggota badan pekerja Persatuan Perjuangan.
- c. Anggota sekretariat terdiri dari anggota-anggota badan pekerja Persatuan Perjuangan.
- d. Anggota badan pekerja adalah mereka yang dipilih oleh anggota-anggota Persatuan Perjuangan ditambah dengan para ahli (dalam hal teknik, ekonomi, administrasi, dan lain-lain) yang disetujui oleh kongres untuk menjalankan putusan kongres.

3. Program Kerja Organisasi Persatuan Perjuangan

Rencana organisasi Persatuan Perjuangan sebagian besar lahir dari pemikiran Tan Malaka. Ada pun rencana yang menjadi pedoman atau prinsip organisasi disebut dengan minimum program, yang terdiri atas tujuh butir pasal yang telah disepakati pada kongres Persatuan Perjuangan 15 Januari 1946 di Solo. Zara (2009) menyebutkan bahwa minimum program tersebut dibuat untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk bekerja sama melaksanakan dengan segera program yang telah diputuskan oleh Persatuan Perjuangan. Adapun isi dari minimum program adalah sebagai berikut.

- a. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%, sesudah tentara asing meninggalkan pantai dan lautan Indonesia.
- b. Pemerintahan rakyat (sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).
- c. Tentara rakyat (sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
- d. Melucuti tentara Jepang.
- e. Mengurus tawanan Eropa.

- f. Menyita dan menyelenggarakan aset pertanian musuh (perkebunan).
- g. Menyita dan menyelenggarakan aset pertanian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).

2.2 Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang akan dibahas, ada pun beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang relevan di antaranya:

1. Penelitian dengan judul “Peranan Tan Malaka dalam Kongres Pertama Persatuan Perjuangan di Purwokerto Tahun 1946. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto” yang dilakukan oleh Lutfi Bayu Susanto pada Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Tan Malaka atas terselenggaranya kongres pertama organisasi Persatuan Perjuangan di Purwokerto. Penelitian ini memberikan informasi mengenai latar belakang terselenggaranya kongres pertama Persatuan Perjuangan, peranan Tan Malaka dalam kongres pertama Persatuan Perjuangan, dan kelanjutan Persatuan Perjuangan setelah kongres pertama di Purwokerto pada Tahun 1946.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Bayu Susanto dengan penelitian ini yaitu terletak pada kajian tentang latar belakang berdirinya organisasi Persatuan Perjuangan, peranan Tan Malaka sebagai inisiator terbentuknya Persatuan Perjuangan, serta posisi Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara yang mendukung upaya revolusi Persatuan Perjuangan. Pada penelitian ini, kajian hanya akan difokuskan pada bagaimana berdirinya peranan Tan Malaka dalam proses pembentukan organisasi Persatuan Perjuangan.

Perbedaan atau kebaruan yang ditawarkan pada penelitian yaitu bagaimana tujuan didirikannya organisasi Persatuan Perjuangan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika pada penelitian tersebut hanya berfokus pada latar belakang dan faktor yang memengaruhi

berdirinya Persatuan Perjuangan, maka pada penelitian ini kajian akan dilakukan lebih luas yaitu mengenai bagaimana pengaruh berdirinya Persatuan Perjuangan terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946.

2. Penelitian dengan judul “Organisasi Persatuan Perjuangan 1946. AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah 2(3)” yang dilakukan oleh Achmad Januar Amroni & Sumarno pada Tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan apa itu organisasi Persatuan Perjuangan serta eksistensinya pada Tahun 1946. Penelitian ini memberikan informasi bahwa terdapat organisasi Persatuan Perjuangan yang didirikan pada Tahun 1946 oleh Tan Malaka sebagai wadah revolusi bagi berbagai organisasi yang eksis pada masa itu.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Januar Amroni & Sumarno dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang membahas tentang eksistensi organisasi Persatuan Perjuangan pada Tahun 1946. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada bagaimana organisasi Persatuan Perjuangan didirikan sebagai upaya untuk merobohkan Kabinet Syahrir.

Perbedaan atau kebaruan yang ditawarkan penelitian ini yakni bahwa didirikannya organisasi Persatuan Perjuangan bukan serta-merta sebagai upaya untuk menjatuhkan Kabinet Syahrir, akan tetapi organisasi ini didirikan sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan merdeka 100%. Meskipun, dalam perjalanannya, organisasi ini berada di pihak oposisi sehingga bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kabinet Syahrir.

3. Penelitian dengan judul “Tan Malaka dan Perjuangannya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. TJANTRIK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah 1(1)” yang dilakukan oleh Niat Mawati Baeha dkk., pada Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai biografi Tan Malaka, strategi perjuangan Tan Malaka, serta pengaruh perjuangan Tan Malaka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini memberikan

informasi mengenai strategi perjuangan Tan Malaka serta pengaruhnya dalam bidang politik dan militer pada era tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Niat Mawati Baeha dkk., dengan penelitian ini terletak pada peran Tan Malaka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan dalam semangat memperjuangkan kemerdekaan 100%, Tan Malaka memilih untuk menjadi pihak oposisi dan berkonfrontasi dengan pemerintah sebagai upaya untuk meraih kemerdekaan sejati.

Perbedaan atau kebaruan yang ditawarkan pada penelitian ini yakni dalam upaya mewujudkan kemerdekaan 100%, Tan Malaka mengajukan gagasan untuk membentuk sebuah *Volksfront* atau front rakyat sebagai wadah perjuangan yang kelak dinamakan sebagai Persatuan Perjuangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi berbagai aspek, di antaranya adalah subjek penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, serta kajian ilmu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengangkat topik “*Persatuan Perjuangan dalam Konstelasi Politik Indonesia pada Masa Revolusi Tahun 1946*”.

1. Objek Penelitian : Persatuan Perjuangan
2. Subjek Penelitian : Upaya Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia Tahun 1946
3. Lokasi Penelitian : a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
b. Arsip Nasional Republik Indonesia
c. KITLV Jakarta
d. Perpustakaan Universitas Lampung
4. Waktu Penelitian : 2025
5. Bidang Ilmu : Sejarah

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Menurut Madjid (2008) metode dalam studi sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip dalam mengumpulkan sumber sejarah secara sistematis, kritis, dan mengajukan sintesis dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen autentik menjadi sebuah tulisan yang saling berkaitan sebagai petunjuk dan teknis tentang bahan, kritik, dan interpretasi sejarah.

Dengan kata lain, metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menggunakan cara atau prosedur secara sistematis sesuai dengan asas-asas ilmu sejarah. Metode sejarah sebagai perangkat asas atau aturan yang didesain secara sistematis guna membantu efektivitas penelitian dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil penelitian dalam bentuk tertulis (Gilbert, 1953). Sementara Gottschalk (1953) memaknai metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis dokumen dan benda peninggalan masa lampau yang autentik serta membuat interpretasi atas fakta-fakta tersebut menjadi naskah sejarah yang kredibel. Sama halnya dengan penelitian lainnya, penelitian sejarah juga memiliki tahapan-tahapan penelitian. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, para ahli sepakat untuk menetapkan empat tahapan yang metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik dapat diartikan sebagai proses pencarian atau pengumpulan sumber dan bukti-bukti sejarah secara diversifikasi untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian pada masa lampau yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, pencarian atau pengumpulan sumber sebagian besar didapatkan melalui kegiatan bibliografis. Melalui kegiatan bibliografis, penelitian akan dimudahkan dengan keragaman informasi untuk memuat suatu penelitian dan menggunakannya sebagai bahan referensi (Sumargono, 2021).

Pada tahap ini, penelitian diarahkan pada kegiatan pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikumpulkan berupa surat kabar, arsip, buku-buku, dokumen, majalah dan artikel ilmiah. Dalam pengumpulan sumber, peneliti melakukan kunjungan ke berbagai tempat, antara lain; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, KITLV Jakarta, Perpustakaan Universitas Lampung, serta beberapa toko buku

terkait. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber primer:

- Surat kabar *Antara* Tahun 1946.
- Surat kabar *Berita Repoeblik Indonesia* Tahun 1946.
- Surat kabar *Boeroeh* Tahun 1946.
- Surat kabar *Kedaulatan Rakjat* Tahun 1946.
- Surat kabar *Lasjkar* Tahun 1946.
- Surat kabar *Merdeka* Tahun 1946.
- Surat kabar *Gelora Rakjat* Tahun 1946.

b. Sumber sekunder:

- Buku “*Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*” karya Benedict Anderson Tahun 2018.
- Buku “*Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*” karya George McTurnan Kahin Tahun 2022.
- Buku “*Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*” karya Harry A. Poeze Tahun 2008.
- Buku “*Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid II: Maret 1946-Maret 1947*” karya Harry A. Poeze Tahun 2008.
- Buku “*Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*” karya M. Yuanda Zara Tahun 2009.
- Buku “*Sejarah Indonesia Modern*” karya M. C Ricklefs Tahun 2016.
- Buku “*Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*” karya Roeslan Abdulgani dkk., Tahun 2004.
- Majalah Prisma “*Manusia dalam Kemelut Sejarah*” karya Alfian dkk., Tahun 1977.
- Jurnal Avatara “*Organisasi Persatuan Perjuangan*” karya Achmad Januar Amroni Tahun 2014.

- Jurnal Pesagi “*Usaha Tan Malaka dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1948*” karya Elis Septiana dkk., Tahun 2017.
- Jurnal Tjantrik “*Tan Malaka dan Perjuangannya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*” karya Niat Mawati Baeha dkk., Tahun 2022.
- Jurnal Siginjai “*Pengambilalihan Kekuasaan Kabinet Syahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946*” karya Pipit Nur Aini Tahun 2023.
- Jurnal Historia “*Tan Malaka, Persatuan Perjuangan dan Historiografi Indonesia Kontemporer*” karya Purnawan Basundoro Tahun 2012.
- Jurnal Criksetra “*Tan Malaka: Dari Gerakan hingga Kontroversi*” karya Uun Lionar dkk., Tahun 2021.

2. Kritik

Pada tahapan ini, kegiatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan kritik terhadap sumber sejarah sebagai upaya untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber. Kritik sumber dilakukan setelah melaksanakan pengumpulan data dan sumber sejarah. Kritik sumber juga dilakukan untuk menelusuri apakah sumber tersebut dapat dipercaya, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sjamsuddin, 2016).

Dalam tahapan ini, ada dua jenis kritik yang harus dilakukan, yaitu kritik *intern* dan kritik *ekstern*. Kritik *intern* dimaksudkan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber, artinya apakah sumber tersebut dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, tidak mengandung bias, dan lain-lain. Sedangkan kritik *ekstern* dilakukan untuk mendapatkan autentisitas sumber dengan melakukan pengkajian fisik terhadap sumber tersebut. Kritik ini mengacu pada pengujian terhadap aspek-aspek luar suatu sumber (Sumargono, 2021).

Peneliti telah mengkaji berbagai sumber dengan mengacu pada prosedur yang ada. Setelah melakukan kritik sumber, peneliti menyeleksi berbagai sumber berupa surat kabar, arsip, buku-buku, majalah, dan jurnal yang secara prosedural terjamin faktual, autentik, kredibel, serta relevan untuk mendukung dan membantu penelitian ini.

3. Interpretasi

Tahap yang dilakukan sebelum mengolah berbagai sumber yang didapatkan menjadi sebuah narasi sejarah yang utuh adalah melakukan interpretasi terhadap sumber. Interpretasi dimaknai sebagai upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam rangka merekonstruksi peristiwa sejarah. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang sifatnya hanya sebagai bagian dari fenomena peristiwa di masa lampau. Tanpa adanya interpretasi, maka sumber sejarah hanya benda yang bersifat objektif serta sebagai bukti di masa sekarang bahwa realitas di masa lampau pernah ada dan pernah terjadi (Wardah, 2014).

Pada tahapan ini, kegiatan interpretasi dilakukan dengan cara memberikan kembali relasi antar fakta-fakta sebagai bukti apa yang pernah terjadi di masa lampau dihubungkan dengan pencarian dan pembuktian antar sumber satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah rangkaian makna yang faktual dan logis. Proses interpretasi pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan objektivitas penafsiran, agar terhindar dari subjektivitas peneliti yang melibatkan seleksi, analisis, komparasi serta kombinasi yang menghasilkan sintesis baru guna mendukung pengkajian yang relevan dengan topik penelitian.

4. Historiografi

Tahapan terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah historiografi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan penulisan atau pelaporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Historiografi dapat dilakukan setelah tiga tahapan sebelumnya (heuristik, kritik, dan interpretasi) sudah terpenuhi. Penulisan dilakukan dengan cara memberikan gambaran yang jelas

mengenai proses penelitian sejak dari tahap awal perencanaan sampai dengan akhir penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tahapan ini mengandalkan keterampilan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah yang didasarkan pada bukti-bukti dan detail fakta yang akurat serta menghasilkan kejelasan struktur, gaya bahasa, aksentuasi dan retorika tertentu (Sjamsuddin, 2016).

Pada penelitian ini, data-data yang sudah diperoleh disusun menjadi sebuah narasi sejarah yang utuh, sistematis, dan objektif sesuai dengan kronologis peristiwa sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kronologis digunakan untuk menjaga alur waktu dan keterkaitan antara satu peristiwa dengan yang lain, sehingga pembaca dapat melihat hubungan sebab-akibat secara jelas. Dengan demikian, narasi yang dihasilkan tidak hanya menawarkan informasi sejarah yang relevan dengan topik penelitian, tetapi juga memberikan perspektif yang objektif dan komprehensif dalam kajian sejarah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis dan dokumen yang relevan. Penggunaan kedua teknik ini membantu peneliti memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian.

3.3.1 Teknik Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan yang mengacu pada pengumpulan sumber dan data seperti buku-buku, majalah, surat kabar, artikel ilmiah, arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan guna mendukung topik penelitian yang sedang dilakukan (Khatibah, 2011).

Pemilihan teknik kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada keselarasan dengan topik kajian penelitian, yaitu sejarah. Dengan menggunakan teknik kepustakaan, peneliti mendapatkan berbagai referensi teori dan materi mengenai pembahasan dan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian. Melalui teknik kepustakaan ini, peneliti berusaha untuk mencari berbagai literatur yang berkaitan serta relevan dengan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti, sehingga diperoleh data yang dapat mendukung penulisan penelitian (Sumargono, 2021).

3.3.2 Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis data tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam sebuah penelitian (Yusuf, 2016).

Teknik dokumentasi mengacu pada sebuah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui surat, catatan, arsip foto, jurnal kegiatan dan lain-lain. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi pada masa lampau (Fadilla & Wulandari, 2023).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, menyajikan data-data yang telah direduksi, dan kemudian menginterpretasikan data yang telah didapatkan. Teknik dokumentasi yang dilakukan melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Pemilihan teknik analisis historis ini didasarkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, yakni peristiwa sejarah. Teknik analisis historis merupakan teknik yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah.

Menurut Sjamsuddin (2016) teknik analisis historis merupakan analisis data yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Membandingkan data dari berbagai sumber sejarah dengan menggunakan kerangka teori dan teknik analisis historis memungkinkan proses verifikasi untuk memperoleh fakta sejarah yang sah. Fakta-fakta tersebut kemudian ditafsirkan melalui proses perangkaian sistematis sehingga membentuk suatu narasi sejarah yang utuh serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah (Rijali, 2018).

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Selain itu, tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti (Hartono, 2018). Teknik analisis data dilakukan sebagai upaya untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data. Ada pun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data ini meliputi memahami data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam struktur data, membersihkan data yang melibatkan identifikasi dan penanganan nilai yang hilang atau tidak valid, serta mengeksplorasi data (Rifa'i, 2023).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan dalam konstelasi politik Indonesia tercermin pada tiga aspek, yaitu menggalang kekuatan politik, menolak berunding dengan Belanda, dan memprakarsai terbentuknya Konsentrasi Nasional. Melalui ketiga aspek tersebut, Persatuan Perjuangan berhasil memainkan peranan penting dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi Tahun 1946. *Pertama*, dalam menggalang kekuatan politik, Persatuan Perjuangan mampu menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpecah-pecah karena perbedaan ideologi maupun kepentingan. Persatuan ini menjadi modal utama dalam menghadapi ancaman eksternal yang berpotensi merebut kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. *Kedua*, menolak berunding dengan Belanda menunjukkan sikap kritis Persatuan Perjuangan terhadap arah perjuangan bangsa. Persatuan Perjuangan menganggap bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih dengan hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga perlu didukung dengan sikap tegas dan militansi agar kedaulatan negara dapat segera diakui oleh dunia internasional. *Ketiga*, pembentukan Konsentrasi Nasional oleh Persatuan Perjuangan merupakan upaya strategis guna menyatukan kembali kekuatan rakyat dalam kerangka perjuangan yang lebih luas, tanpa harus berbenturan secara langsung dengan pemerintah. Terbentuknya Konsentrasi Nasional membuka peluang agar nilai-nilai perjuangan bisa tetap memengaruhi jalannya revolusi, kendati dalam bentuk yang lebih halus, sehingga dapat menghasilkan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan perjuangan bangsa.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan melalui ketiga aspek tersebut menjadi unsur elementer dalam konstelasi politik Indonesia pada masa revolusi, khususnya Tahun 1946. Semangat perjuangan yang dibangun dapat menjadi refleksi bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. Meskipun pada akhirnya gerakan ini tidak berhasil secara politis, keberadaan Persatuan Perjuangan menunjukkan kompleksitas perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Persatuan Perjuangan menjadi suara keras yang mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar hasil perundingan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan secara terus-menerus disertai dengan keberanian, pengorbanan, dan persatuan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai “*Persatuan Perjuangan dalam Konstelasi Politik Indonesia pada Masa Revolusi Tahun 1946*”, maka saya menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penguatan Pendidikan Sejarah Kritis

Institusi pendidikan perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk membahas mengenai kontribusi berbagai kelompok radikal-revolusioner dalam kronik revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini penting agar generasi muda mafhum bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui berbagai jalan perjuangan, bukan hanya melalui dinamika politik yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga melalui gagasan keberanian dan oposisi rakyat.

2. Evaluasi Strategi Nasional Berdasarkan Kepentingan Rakyat

Penolakan Persatuan Perjuangan terhadap kebijakan diplomasi pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan negara harus senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pragmatis belaka. Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan nasional, perlu ada keberanian untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama.

3. Dokumentasi dan Penelitian Lanjutan

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumber referensi sekaligus pemantik untuk meningkatkan pengetahuan mengenai topik sejarah yang dibahas. Penelitian sejarah yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mengangkat kembali kontribusi gerakan-gerakan akar rumput serta dinamika ideologis yang membentuk Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Antara, Dalam Negeri, 18 Januari 1946

Boeroeh, 22 Mei 1946

Boeroeh, 30 Januari 1946

Boeroeh, 6 Maret 1946

Boeroeh, 7 Januari 1946

Gelora Rakjat, 30 Maret 1946 hal. 2

Kedaulatan Rakjat, 1 April 1946

Kedaulatan Rakjat, 10 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 11 Februari 1946 hal. 2

Kedaulatan Rakjat, 12 Maret 1946

Kedaulatan Rakjat, 13 Februari 1946

Kedaulatan Rakjat, 15 Februari 1946

Kedaulatan Rakjat, 16 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 16 Maret 1946

Kedaulatan Rakjat, 17 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 18 Februari 1946 hal. 2

Kedaulatan Rakjat, 18 Maret 1946

Kedaulatan Rakjat, 19 Maret 1946

Kedaulatan Rakjat, 20 Februari 1946

Kedaulatan Rakjat, 28 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 29 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 30 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 4 Juni 1946

Kedaulatan Rakjat, 5 Juni 1946

Kedaulatan Rakjat, 6 April 1946

Kedaulatan Rakjat, 6 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 7 Februari 1946

Kedaulatan Rakjat, 7 Januari 1946

Kedaulatan Rakjat, 7 Maret 1946

Kedaulatan Rakjat, 9 Februari 1946

Kedaulatan Rakjat, 9 Maret 1946

Lasjkar, 8 Mei 1946

Lasjkar, 18 Januari 1946 hal. 2

Lasjkar, 18 Maret 1946 hal. 2

Lasjkar, 27 April 1946 hal. 2

Lasjkar, 30 Januari 1946 hal. 2

Merdeka, 19 Januari 1946 hal. 2

Merdeka, 8 Oktober 1945

Merdeka, 17 Mei 1946 hal. 9

Buku dan Jurnal

- Abdulgani, R., Nasution, A. H., Poeradisastra, S. I., & Sudyarto, S. 2004. *Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan: Dilengkapi dengan pidato Tan Malaka Membangun Dunia yang Adil untuk Semua Bangsa*. Jakarta: Restu Agung.
- Aini, P. N. 2023. Pengambilalihan Kekuasaan Kabinet Sjahrir oleh Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 3(1).
- Aji, W. T. 2024. Tan Malaka, Konsep Merdeka 100% dalam Menyempurnakan Kemerdekaan Indonesia. *ResearchGate*.
- Alfian. 1977. Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian. *Majalah Prisma*, 8(8).
- Amroni, A. J. 2014. Organisasi Persatuan Perjuangan 1946. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3).
- Anderson, B. 2018. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Anggraeini, P. D., Susanto, H., & Pratama, R. A. 2022. Revolusi Indonesia dalam Perspektif Pro dan Kontra Pers Nasional Periode Pasca Proklamasi hingga Tercapainya Pengakuan Kedaulatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1).
- Antoni, A., Thariq, D., Fathul, M., & Wijaya, S. 2024. Sejarah Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1).
- Ayuningtyas, D. R., Suharso, R., & Sodik, I. 2016. Perjuangan Panglima Besar Jenderal soedirman pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 5(1).
- Baeha, N. M., Kaswati, A., & Jurahman, Y. B. 2022. Tan Malaka dan Perjuangannya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. *TJANTRIK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Basundoro, P. 2012. Tan Malaka, Persatuan Perjuangan dan Historiografi Indonesia Kontemporer. *HISTORIA: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(2).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1965. *Sedjarah Perdjjuangan Pemuda Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. 2023. Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3).

- Malaka, T. 2015. *Catatan-catatan Perjuangan (1946-1948)*. Bandung: Segarsy.
- Malaka, T. 2017. *Thesis*. Sleman: Octopus.
- Malaka, T. 2022. *Muslihat, Politik & Rencana Ekonomi Berjuang*. Yogyakarta: Narasi.
- Malik, A. 1978. *Mengabdi Republik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasbi, H. 2004. *Filosofi Negara Menurut Tan Malaka*. Yogyakarta: LPPM Tan Malaka.
- Pambudi, W. 2023. Pengaruh Peristiwa 3 Juli 1946 terhadap Pemerintahan Sjahrir dalam Menegakkan Kemerdekaan Indonesia. *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 4(2).
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. 2022. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Permana, W. A., Novitasari, U., & Khomairoh, R. 2024. *Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi*. Lampung: CV. Inspro Pustaka.
- Poeze, H. A. 2008a. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid I: Agustus 1945 - Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Poeze, H. A. 2008b. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid II: Agustus 1945 - Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prayogi, A. 2024. *Sejarah Nasional Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Prihartanti, B. 2010. *Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947)*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Rahman, M. A. 2013. *Tan Malaka, Pahlawan Besar yang Dilupakan Sejarah*. Yogyakarta: Palapa.
- Ricklefs, M. C. 2016. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rifa'i, Y. 2023. Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1).
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).

- Rinardi, H. 2017. Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 150.
- Rogers, E. M. 2003. *Diffusion of Inovations*. New York: Free Press.
- Rohman, A. 2017. Peran Persatuan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia Tahun 1946. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3).
- Sastrosatomo, S. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Septiana, E., Syah, I., & Syaiful, M. 2017. Usaha Tan Malaka dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1948. *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 5(9).
- Setiawan, H. 2020. Sutan Sjahrir, Sosialisme, dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1962. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Setiawan, R. 2019. *Konflik Politik Sutan Sjahrir-Tan Malaka Tahun 1945-1947*. Universitas Jember, Jember.
- Setiawan, S., Syaiful, M., & Wakidi. 2015. Peranan Mayor Jenderal Sudarsono dalam Peristiwa 3 Juli 1946 di Indonesia. *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 3(2).
- Simatupang, T. B. 1981. *Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Yayasan Pustaka Militer.
- Sirait, K., Pardosi, F. P., Manullang, V., & Sirait, R. 2023. Sejarah Pemikiran Politik Tan Malaka Mengenai Kemerdekaan dan Konsep Negara Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956*, 4(6).
- Sjamsuddin, H. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumargono. 2021. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Syahputra, F. 2011. *Perbandingan Strategi Perjuangan Sutan Syahrir dan Tan Malaka pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1942-1948)*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Syahrir, S. 1995. *Perjuangan Kita*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49.
- Tempo. 2017. *Syahrir, Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tempo. 2022. *Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Utomo, I. B. S. 2006. *Pemikiran dan Perjuangan Tan Malaka 1945-1949*. Universitas Indonesia, Depok.
- Wahyudi, A., & Hartati, U. 2021. Peranan Sutan Sjahrir dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1950). *Swarnadwipa*, 5(3).
- Wardah, E. S. 2014. Metode Penelitian Sejarah. *Tsaqofah*, 12(2).
- Winardi, J. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yamin, M. 1946. *Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia*. Jakarta: Berita Indonesia.
- Yamin, M. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, A. M. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.
- Zara, M. Y. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.